

ABSTRAK

Larangan alat tangkap yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menuai banyak kontroversi. Protes dari para nelayan termasuk dari nelayan yang berada di Kabupaten Pati Jawa Tengah terhadap peraturan ini dikarenakan hasil produksi yang tinggi atas pemakaian alat tangkap pukat hela dan pukat tarik sehingga nelayan sulit untuk beralih dari alat tangkap tersebut, sementara alat tangkap pukat hela dan pukat tarik mengakibatkan rusaknya habitat dan terkurasnya sumber daya ikan. Permasalahan penulisan ini yakni bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di Kabupaten Pati Jawa Tengah dan dampaknya terhadap nelayan Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta wawancara sebagai data dukung, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi dari Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya matang, karena mengakibatkan banyaknya nelayan terutama di Kabupaten Pati Jawa Tengah yang tidak dapat melaut karena mengalami kesulitan untuk beralih alat tangkap ikan dan Implementasi dari Peraturan Menteri tersebut di Kabupaten Pati Jawa Tengah masih berada dalam masa pengalihan, yakni masa peralihan untuk beralih menggunakan alat takap yang lebih ramah lingkungan. Dampak yang terjadi atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 ini adalah konflik sosial pro dan kontra antar nelayan dan demo besar – besaran yang dilakukan oleh nelayan.

Pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan, ada baiknya tidak hanya berdasarkan dampak jangka panjang namun juga perlu menggali lebih dalam mengenai dampak jangka pendek yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Nelayan, Alat Tangkap Ikan, Permen Nomor 2 Tahun 2015